

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arief, B. W. (2008). *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Atmosdirjo, S., & Prajudi. (2002). *Hukum dan Pengawasan Keimigrasian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bappenas. (2019). *Visi Indonesia 2045 – Background Study*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 1–158.
- Cahyadi, M. K. B. Y. (2023). *Pengaturam Deportasi Warga Negara Asing di Bali ditinjau melalui Undang-Undang Keimigrasian*.
- Ishaq. (2006). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C. S. T. (2002). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Manan, B. (2002). *Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta.
- Rahardjo, S. (2003). *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rasjidi, L. (2002). *Dasar-dasar Filsafat Hukum*. Bandung: Alumni.
- Reksodipuro, M. (1994). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan*. Buku Kedua. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Soekanto, S. (2005). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S. (2003). *Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina Cipta.
- Sudikun, A., & Mertokusumo. (1999). *Mengenal Hukum Keimigrasian di Indonesia*. Jakarta: Liberty Press.
- Ukun, W. (2004). *Deportasi sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara Di Bidang Keimigrasian*. Jakarta: PT. Adi Kencana Aji.

JURNAL

- Ahmad, R. S. & Sa'adah, N. (2021). Analisis Peranan Dan Strategi Dalam Melaksanakan Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing. *Jurnal Spektrum Hukum*, 18(1).
- Akbar, F. (2021). Strengthening Immigration Function as Facilitator of Community Welfare Development in Morotai Special Economic Zone. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 4(1), 9-21.
- Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2019). Perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan pengguna CRM (Cash Recycling Machine). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(3), 286. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p07>
- Masyithoh, N. D. (2016). Dialektika Pluralisme Hukum: Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman Keberagaman dan Keberagamaan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24(2), 360.
- Mustari, K. A. & Jannah, R. N. (2021). Evaluation Of Apoa Version 2.0 Socialization Activities to Improve the Cadre of Supervision of Foreigners in South Sulawesi. *Jurnal Abdimas Imigrasi*, 2(2), 55-63.
- Prayulianda, H. A., & Antikowati. (2019). Pengawasan Warga Negara Asing Penerima Bebas Visa Kunjungan dalam Perspektif Hukum Kewarganegaraan. *Lentera Hukum*, 6(1), 141–150.
- Putri, R. S. I. (2020). Penguatan Fungsi Keimigrasian Sebagai Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024. Skripsi.
- Santoso, M. & Imam. (2003). Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan dan Ketahanan Nasional. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sulaiman, E. (2016). Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ash-Shahabah*, 2(1), 66.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI tentang Pedoman Pengawasan Orang Asing di Indonesia.
- Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Pasal 28 dan 29 Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pengawasan Orang Asing.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjamin Keimigrasian.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Orang Asing.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022 Prosedur Penindakan Keimigrasian.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Orang Asing oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 18 Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 13 Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 68 Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 71 Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 75 Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 78 Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 124 Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

WEBSITE

Direktorat Jenderal Imigrasi. (2024). *Deportasi WNA Denmark yang Overstay di Bali*. Retrieved from Imigrasi Denpasar. <https://www.imigrasi.go.id/berita/2021/07/28/imigrasi-denpasar-deportasi-wn-denmark-yang-overstay-di-bali?lang=id-ID>.

Dylan, M. (2020). *Pengawasan Keimigrasian*. BPSDM KUMHAM Press. Retrieved from https://lcbadiklatjateng.kemenkumham.go.id/wp-content/uploads/2021/02/50_pengawasan-keimigrasian-ditjen-imigrasi.pdf

Safitri, A. R. (2022). Imigrasi Tindak 1.033 Pelanggaran Administratif Keimigrasian Dalam Empat Bulan Terakhir. Retrieved from Imigrasi.Go.Id. <https://www.imigrasi.go.id/id/2022/05/23/imigrasi-tindak-1-033-pelanggaran-administratif-keimigrasian-dalam-empat-bulan-terakhir/>

Immigration Today. (2024). *Imigrasi Ngurah Rai Boyong Dua Penghargaan dalam Pengawasan Orang Asing*. Retrieved from <https://immigrationtoday.id/2024/12/11/imigrasi-ngurah-rai-boyong-dua-penghargaan-dalam-pengawasan-orang-asing/>.

The Bali Sunset. (2024). *Dugaan Pelanggaran oleh WNA, Imigrasi Ngurah Rai Bertindak*. Retrieved from <https://beritaind.com/2024/05/31/dugaan-pelanggaran-oleh-wna-imigrasi-ngurah-rai-lakukan-pengawasan/>.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Ijin Pengambilan Data

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

Jalan dr. Antonius Suryo
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 75916201
Laman: www.fh.undip.ac.id Pos-el: fh@five.undip.ac.id

Nomor : 296 /UN7.F1/AK/II/2025 14 FEB 2025
Lamp. :
Hal : Permohonan Ijin Pengambilan Data/Informasi

Yth. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai
Jl. Raya Taman Jimbaran No.1, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung,
Bali 80361

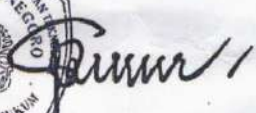
Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan tugas mata kuliah
sebagaimana tercantum dalam kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro, memerlukan beberapa data/informasi sebagai bahan referensi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin
pengambilan data/informasi di lingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

nama : Justisa Eldest Gabbana
NIM : 11000121140828
semester : 8
mata kuliah : Tugas Akhir
alamat : Harvest City Cibubur Cluster Oleander OJ07 No.19, Kab.
Bekasi, Jawa Barat.
nomor HP : 081281371391

data/informasi yang diperlukan :
- Data Pelanggaran WNA di Provinsi Bali pada tahun 2023-2024.
- Wawancara mengenai bagaimana pelaksanaan pengawasan WNA oleh Tim Pora Kantor Imigrasi dan apa saja kendala dan solusi yang dihadapi oleh Tim Pora dalam melaksanakan pengawasan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.


Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Lampiran 2. Surat Ijin Pengambilan Data



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KANTOR WILAYAH BALI
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI
Jalan Perum Taman Jimbaran, No. 1, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali

Nomor : WIM.20-UM.01.01-4262
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Ijin Pengambilan Data /informasi

8 April 2025

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
di tempat

Sehubungan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 396/UN7.F1/AK/II/2025 tanggal 14 Februari 2025 hal Permohonan Ijin Pengambilan Data/Informasi, bersama ini disampaikan bahwa kami dapat memberikan ijin pengambilan data/ informasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai selama 2 (dua) hari mulai tanggal 10 s.d. 11 April 2025 kepada mahasiswa atas:

Nama : Justisa Eldest Gabbana
NIM : 11000121140828
Progran Studi : Sarjana Hukum

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Kepala Kantor,



Disandatangani secara elektronik oleh :
Winarko

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Penelusuran dokumen dapat dilakukan melalui tautan: <https://bssn.bssn.go.id/verifikasi>